

**POLITIK LINGKUNGAN:
STUDI TENTANG PERUBAHAN STATUS HUTAN LINDUNG MENJADI
KAWASAN WISATA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KABUPATEN BONE**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

OLEH:

HAFIDAH

E111 16 301

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK LINGKUNGAN:

**Studi Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Menjadi Kawasan Wisata Di
Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone**

Yang diajukan oleh :

HAFIDAH

E111 16 301

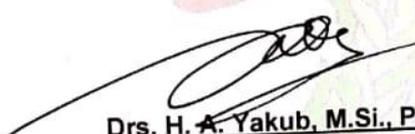
Akan Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi

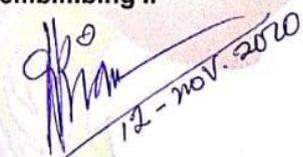
Pada Tanggal November 2020

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

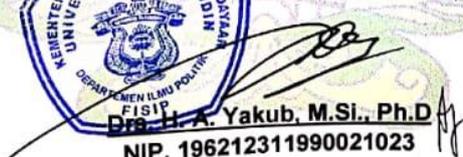

Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023


Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si
NIP. 197107051998032002

Mengetahui,

**Ketua Departemen
Ilmu Politik**




Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990021023

HALAMAN PENERIMAAN

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

POLITIK LINGKUNGAN:

STUDI TENTANG PERUBAHAN STATUS HUTAN LINDUNG MENJADI
KAWASAN WISATA DI KECAMATAN TANETE RIATTANGTIMUR
KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh :

HAFIDAH
E111 16 301

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si.

Anggota : A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si.

Anggota : Ummi Suci fathia Bailusy, S.IP., M.Si.

Pembimbing 1 : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D.

Pembimbing 2 : Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si.

Handwritten signatures of the examination committee members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAFIDAH
NIM : E11116301
Jenjang Pendidikan : Strata-1 (S1)
Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“POLITIK LINGKUNGAN:STUDI TENTANG PERUBAHAN STATUS HUTAN LINDUNG MENJADI KAWASAN WISATA DI KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE”** adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Desember 2020



(HAFIDAH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan Skripsi dapat selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini berjudul “Politik Llingkungan: Studi Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Menjadi Kawasan Wisata Di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib sebagai mahasiswa strata satu (S1), untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Amir dan Ibu Suedah, yang telah merawat, membesarkan, dan mendidik penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D dan Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dalam membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan petunjuk dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, untuk

itu pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan FISIP UNHAS yang telah banyak membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Wakil Dekan I FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Dr. Suparman Abdullah, M.Si selaku wakil Dekan II FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan bagi penulis dalam urusan-urusan administrasi.
5. Bapak Dr. Hasrullah, M.Si selaku Wakil Dekan III FISIP UNHAS yang telah memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan banyak kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik di Program Studi Ilmu Politik.

7. Seluruh dosen-dosen Program Studi Ilmu Politik : Bapak Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm), Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm), Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Andi Ali armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus, M.Si, Bapak Imran, S.IP, M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati S.IP, M.Si yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Jurusan Ilmu Politik, khususnya Ibu Hasna, Bapak Aditya dan Bapak Hamzah, yang senantiasa membantu penulis dalam urusan-urusan administrasi akademik.
9. Seluruh teman- teman angkatan 2016 di program studi ilmu politik yang telah memberikan banyak motivasi selama proses perkuliahan.
10. Seluruh teman- teman KKN UNHAS Gel. 102 Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, terkhusus posko Kelurahan Majang. Novi, Dinda, Febi, Cimma, Cinu, Maudy, Farras, dan Yasir terima kasih atas waktunya dimasa KKN.
11. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi rumah belajar penulis selama menjadi mahasiswa.

12. Teruntuk Blackpink yang senantiasa menemani suka duka penulis, terima kasih bagi kembar ku Ira, teman ghibah ku Wanda, dan teman perkpopan ku Tenri.
13. Untuk teman seperjuangan yang sangat pengertian, Gusti, Eva, Risma, dan Wide.
14. Untuk saudari-saudariku, Kak Linda dan Hilda yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
15. Kepada seluruh informan atas kesediaannya menyisihkan waktu bagi penulis untuk melakukan wawancara terkait data-data yang penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki dan sebagai manusia biasa yang senantiasa memiliki keterbatasan. Namun penulis tetap yakin bahwa setiap kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini akan ada banyak makna yang dapat dipetik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Oleh karena itu, segala masukan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak untuk peningkatan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Makassar, 30 November 2020

Penulis

ABSTRAK

Hafidah. E111 16 301, dengan judul Skripsi “Politik Lingkungan: Studi Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Menjadi Kawasan Wisata”. Di bawah bimbingan Bapak Andi Yakub sebagai Pembimbing I dan Ibu Ariana Yunus sebagai Pembimbing II

Perubahan atau peralihan fungsi hutan lindung merupakan salah satu bagian dari pengelolaan hutan. Hal ini pula yang terjadi di Kelurahan Pallette yakni perubahan dari hutan lindung menjadi kawasan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tindakan dari aktor langsung (Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten) maupun tidak langsung terhadap perubahan status hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Pallette.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone, tepatnya di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kelurahan Pallette. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara mendalam (indepht interview) kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan status hutan lindung memberikan dua implikasi penting. Pertama, aktor langsung yang memanfaatkan adanya kebijakan sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan pribadi atau menjadi penumpang gelap akan kebijakan tersebut. Kedua, aktor tidak langsung yang ikut berperan penting terhadap perubahan tersebut karena memberikan pula peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, peningkatan ditingkat ekonomi tentu tak akan selalu memberikan implikasi yang baik secara jangka panjang terhadap lingkungan akibat adanya perubahan status hutan lindung dan pengembangan objek wisata.

Kata Kunci : Politik Lingkungan, Kebijakan, Aktor Langsung dan Aktor Tidak Langsung

ABSTRACK

Hafidah. E111 16 301, with the title of Thesis "Environmental Politics: A Study on Changing the Status of Protected Forests into Tourist Areas". Under the guidance of Mr. Andi Yakub as Advisor I and Mrs. Ariana Yunus as Advisor II

Change or change in the function of protected forests is one part of forest management. This also happened in Pallette Village, namely the change from a protected forest to a tourist area. This study aims to determine the actions of the direct actors (Provincial Government, District Government) and indirectly on the change in the status of a protected forest to a tourist area in Pallette Village.

This research was conducted in Bone Regency, precisely in Tanete Riattang Timur District, Pallette Village. The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The technique used in data collection is through the in-depth interview process (indepht interview) to several informants as well as from other sources related to this research.

The results show that the policy of changing the status of protected forest has two important implications. First, direct actors who take advantage of the policy as part of fulfilling personal interests or become stowaways of the policy. Second, indirect actors play an important role in these changes because they also provide an increase in the economy and welfare. However, an increase at the economic level will certainly not always provide good long-term implications for the environment due to changes in the status of protected forests and the development of tourist attractions.

Keywords: Environmental Politics, Policy, Direct Actor and Indirect Actor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perspektif Politik Lingkungan	9
2.2 Konsep Kebijakan Publik	14
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	15
2.2.2 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.3 Kajian Aktor	20

2.3.1 Aktor langsung	21
2.3.2 Aktor Tidak Langsung	22
2.4 Konsep Hutan	23
2.4.1 Pengertian Hutan	23
2.4.2 Peralihan Fungsi Hutan	24
2.5 Telaah Pustaka	25
2.6 Kerangka Pemikiran	28
2.7 Skema Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	31
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bone	38
4.1.1 Kondisi Geografis	38
4.1.2 Kondisi Iklim	39
4.1.3 Kondisi Topografi	40
4.1.4 Kondisi Geologi	40
4.1.5 Kondisi Penduduk	41
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Timur	41

4.2.1 Kondisi Geografis	41
4.2.2 Kondisi Penduduk	41
4.3 Gambaran Umum Kelurahan Pallette	43
4.3.1 Sejarah Kelurahan Pallette	43
4.3.2 Kondisi Geografis	44
4.3.3 Kondisi Penduduk	45
4.3.4 Kondisi Hutan Di Kelurahan Pallette	46
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
5.1 Aktor Langsung dan Aktor Tidak Langsung.....	48
5.1.2 Aktor Langsung	47
5.1.3 Aktor Tidak Langsung	59
BAB VI PENUTUP	64
6.1 Kesimpulan	64
6.2 Saran	65
Daftar Pustaka	64
Lampiran	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian	35
Tabel 2. Luas dan Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur Tahun 2017	42
Tabel 3. Jumlah Lingkungan Menurut Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur Tahun 2017	43
Tabel 4. Kondisi Penduduk Kelurahan Pallette	45
Tabel 5. Luas Kawasan Hutan Sulawesi Selatan 2009	52
Tabel 6. Luas Kawasan Hutan Sulawesi Selatan 2019	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Implementation as a political and administrative process	20
Gambar 2. Peta Hutan Kelurahan Pallette Setelah Adanya SK Menlhk No 362 Tahun 2019	53
Gambar 3. Wisata Tanjung Pallette	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Dianugerahi dengan iklim tropis, Indonesia terdiri atas lebih dari 17.000 buah pulau yang terletak di antara 2 (dua) benua, Asia dan Australia, dan di antara 2 (dua) samudera, Samudera Pasifik dan Samudera India. Disebabkan oleh lokasi geografis ini, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas yang sangat tinggi, dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati lebih tinggi dari negara lain di dunia, kecuali Brasil dan Kolombia.

Berdirinya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto merupakan suatu jalan baru dalam memulai kebangkitan bangsa setelah keadaan yang tak menentu di akhir masa Orde Lama. Sejak menjabat pada tahun 1966, Soeharto menganut paradigma 'pertumbuhan ekonomi'. ia memacu berbagai sektor seperti minyak bumi, kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, sebagai prioritas program pembangunan rezim Orde Baru, dan sangat berbeda dengan rezim Orde Lama, di mana politik sebagai panglima yang lebih besar (Garuda Nusantara dalam Hidayat, 2011:31).

Berbagai kebijakan dikeluarkan dalam menjalankan misi pembangunan ekonomi tersebut. Misalnya, dalam pembangunan sektor kehutanan, pemerintah melancarkan kebijakan dengan memperbolehkan sektor swasta untuk menebang dan mengekspor log (kayu bulat). Hal ini kemudian memberikan dampak yang tidak terduga selama perjalanannya.

Di era reformasi, dengan adanya desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri daerahnya. Hal ini tentu membuka peluang bagi terselenggaranya percepatan kesejahteraan masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Misalnya saja dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang dapat lebih mudah dijalankan. Akan tetapi, seiring berjalannya desentralisasi kemudian tak selalu memberikan dampak positif. Terbukanya kewenangan daerah yang dapat mengatur sendiri

kebutuhannya sering disalahgunakan. Seperti halnya dalam pengelolaan hutan yang merupakan rahmat yang besar diberikan kepada Indonesia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia Tahun 2019, menunjukkan luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta ha atau 50,1% dari total daratan, 92,3% dari total luas berhutan atau 86,9 juta ha berada di dalam kawasan hutan (ppid.menlhk.go.id).

Rahmadi (2016) memaparkan berdasarkan status penguasaannya, hutan dapat dibedakan atas hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak.

Lanjut oleh Rahmadi (2016), pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi : perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan.

Kini pemanfaatan hutan dilakukan dengan berbagai mekanisme mulai dari mengizinkan hutan untuk dikelola oleh pihak swasta, meningkatkan hutan produksi bahkan peralihan fungsi hutan itu sendiri. Selain itu,

bentuk pemanfaatan yang kini dilakukan berupa perhutanan sosial yang memiliki beberapa pola atau skema yakni diantaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan adat. Pemanfaatan hutan telah diatur dalam berbagai aturan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.

Selain itu, berbagai faktor dapat menyebabkan adanya perubahan terhadap hutan itu sendiri, misalnya adanya peralihan fungsi hutan. Peralihan fungsi hutan lindung merupakan bagian dari pengelolaan kawasan hutan lindung. Disebutkan bahwa peralihan fungsi hutan lindung itu sendiri dapat terjadi jika ada perubahan dalam fungsinya sebagai penyangga kehidupan, adanya permukiman, adanya bentuk kegiatan persawahan, dan sejenisnya.

Namun, pemanfaatan dalam hutan lindung dapat pula dilakukan dengan menggunakan jasa lingkungan yang telah disebut diawal. Jasa lingkungan yang dapat dilakukan yakni pemanfaatan tempat wisata. Ketika pembangunan ekonomi yang kemudian menjadi prioritas, pembangunan dalam sektor pariwisata menjadi alternatif yang mapan khususnya yang berada dalam kawasan hutan lindung.

Pemanfaatan tersebut tentu mengikuti aturan yang berlaku dan tidak boleh melewati batas. Pemanfaatan kawasan hutan lindung dengan bentuk tempat wisata telah banyak dimanfaatkan. Salah satunya di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki panjang pantai 130,45 km yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone memiliki potensi wisata yang berada di pesisir pantai Bone yakni kawasan wisata Tanjung Pallette. Tanjung Pallette terletak dikelurahan Pallette, 12 km dari kota Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Kelurahan Pallette memang sangat strategis, hamparannya berada di atas bukit kapur, dikelilingi oleh tebing, dan gerusan ombak Teluk Bone serta dinaungi oleh pohon-pohon tinggi dan rindang. Akar tunggang terlihat muncul dari tebing-tebing di sepanjang pesisir.

Terkait kegiatan pariwisata di kelurahan Pallette yang begitu indah masih memberikan kekhawatiran atas pemanfaatannya. Lokasinya yang strategis dengan berbagai pilihan pemanfaatan nampaknya menjadi pemicu beragamnya stakeholders untuk memanfaatkan kawasan ini. Tak

luput pula pemanfaatan wilayah dengan pendirian villa atau kompleks wisata sebagai pendukung daya tarik pengunjung kian banyak. Hal ini pula lah yang memberikan ruang kepada free rider (penumpang gelap) yang ada dalam pengembangan objek wisata sekaligus atas perubahan status hutan lindung menjad kawasan wisatayang ada di Kelurahan Palette.

Setelah dikeluarkannya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi awasan hutan, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan dari hutan lindung tersebut tentu memberikan jalan terbuka bagi tempat wisata untuk terus dikembangkan tanpa terhalang oleh aturan kehutanan karena statusnya.

Isu lingkungan dan kekuasaan terkait pengelolaannya telah memunculkan berbagai pandangan salah satunya politik lingkungan. Politik lingkungan dalam banyak negara di dunia mempunyai peran penting tidak hanya pada tingkatan yang berbeda, tetapi juga dalam bingkai kerja struktural yang berbeda. Dalam salah satu kajian politik lingkungan, ada dua aktor yang menjadi pelaku dalam pengelolaan hutan di Indonesia yakni aktor langsung (negara dan swasta) dan aktor tidak langsung (masyarakat lokal, LSM, lembaga keuangan).

Peran dari para stakeholder tentu memberikan kontribusi terhadap peralihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Palette, baik itu para aktor atau pelaku langsung maupun tidak langsung yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan maupun tindakan yang diambil. Keputusan-keputusan tersebut tentu memiliki dampak terhadap sumber daya hutan maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal yang tinggal di dalam kawasan hutan lindung sebelumnya. tak hanya itu, kepentingan tersendiri bagi para stakeholder yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini penulis memaparkan bagaimana perubahan status dari hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone berdasarkan perspektif politik lingkungan. Bagaimana kemudian para stakeholder dalam mengambil tindakan terhadap perubahan status tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian yakni **“Politik Lingkungan: Studi Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Menjadi Kawasan Wisata Di Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tindakan dari aktor langsung dan aktor tidak langsung dalam perubahan status hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Palette Kabupaten Bone.

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian pada tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan status hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Pallette Kabupaten Bone berdasarkan perspektif politik lingkungan. Dan memaparkan secara deskriptif tindakan para aktor langsung dan aktor tidak langsung dalam perubahan status hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Pallette Kabupaten Bone.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis terutama pada ranah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian terkait selanjutnya. Kemudian dapat memberikan sumbangan teoritis bagi implementasi maupun pengembangan dalam program studi ilmu politik khususnya topik mengenai Politik Lingkungan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya dalam informasi pemahaman dan pemikiran yang disajikan kepada masyarakat atau pembaca yang membaca penelitian skripsi ini mengenai isu politik lingkungan khususnya yang ada di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka atau *literature review* adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para ilmuwan sebelumnya. Pentingnya tinjauan pustaka untuk melihat dan menganalisa nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Raco, 2010:104).

2.1 Perspektif Politik Lingkungan

Penelitian ini berjudul “Politik Lingkungan: Studi Tentang Perubahan Status Hutan Lindung Menjadi Kawasan Wisata”. Ini meneliti tentang perubahan status hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Palette berlandaskan pada perspektif politik lingkungan sebagai salah satu bagian dari kajian ilmu politik itu sendiri.

Berdasarkan penuturan dari Greenberg dan Park dalam Seftyono (1994) terkait politik lingkungan, terdapat empat aspek pendekatan dalam melihat politik lingkungan yakni:

1. Kajian Sains

Kajian politik lingkungan yang dimulai dari pendekatan sains didasarkan pada perspektif geografi yang mengkaji iklim, temperature, ketinggian tempat dan segala yang berkaitan dengan sistem biologi.

2. Kajian Sosial Kemasyarakatan

Yang perlu dikaji dalam kaitannya dengan isu sosial kemasyarakatan sebuah ekosistem adalah sejarah ekosistem itu sendiri, budaya yang melekat padanya, sistem ekonomi, geografi manusia (relasi manusia dengan alam) dan juga pembangunan. Artinya pembahasan antara lingkungan dengan pendekatan kontemporer tidak bias dilepaskan pada relasi antara lingkungan dengan masyarakat itu sendiri. Baik masyarakat lokal maupun penduduk yang tidak bermukim di wilayah tersebut.

3. Kajian Politik Ekonomi

Kajian politik ekonomi menurut Greenberg dan Park (1994: 6) identik dengan diskursus atas keuntungan.

4. Sudut Pandang Politik Lingkungan

Kajian mengenai politik lingkungan adalah membicarakan tentang proses dialog 'sains', 'sosial', dan 'politik ekonomi', yang menjadi satu kesatuan.

Banyak ilmuwan (Paterson, 2000; Bryant, 1992, Vayda, 1983; Blaikie dan Brookfield, 1987, Abe Ken-ichi, 2003; dan sebagainya) memberikan definisi yang berbeda (Hidayat, 9: 2011). Paterson (2000) mengatakan bahwa 'politik lingkungan' adalah suatu pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara lingkungan dan manusia, dan antara kelompok yang bermacam-macam di dalam masyarakat dalam skala dari

individu lokal kepada transnasional secara keseluruhan. Ilmuwan lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai 'suatu bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem (Blaikie dan Brookfield dalam Hidayat, 1987).

Konsep ini telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti 'Dunia-Ketiga Politik Lingkungan', dimana Bryant dalam Hidayat (1992) mengatakan, bahwa 'politik lingkungan' boleh didefinisikan sebagai usaha untuk memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari pergantian lingkungan. Pemahaman terkini 'politik lingkungan' adalah cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan atas suatu susunan sistem manusia (Rocheleau *et al* dalam Hidayat, 1996). Abe Ken-ichi mendefinisikan politik lingkungan sebagai 'suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk secara kritis menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal-usul kerusakan sumber daya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis. Dalam pengertian lain, 'politik lingkungan' peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Jelaslah, bahwa lingkup dari politik lingkungan telah merujuk sebagai 'suatu metode analisis' daripada disiplin ilmu pengetahuan yang menyatu atau subdisiplin, yang biasanya diwarnai oleh rangkuman gagasan yang berhubungan, premis dan teori (Hidayat, 9: 2011).

Adapun Vayda dalam Hidayat (1983) mengomentari 'politik lingkungan' adalah sama atas suatu metode terapan oleh ahli-ahli lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang relevan, ini yang dikenal dengan sebutan '*progressive contextualization* (kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini dimulai dengan aktor (pelaku), dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak berbuat dalam cara yang khusus terhadap suatu sumber daya alam. Pendekatan ini juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan sumber daya berkurang atau rusak sehingga dapat membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Peluso dalam Hidayat, 10: 2011).

Mengamati skala sosial dan lingkungan yang berbeda, 'politik lingkungan' menjelaskan sekurangnya tiga penelitian area yang berbeda (Bryant dalam Hidayat, 1992). Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Judul ini merefleksikan pengaruh yang tumbuh dari kekuatan nasional dan transnasional atas lingkungan dari suatu dunia yang saling bertambah ketergantungan, baik secara politik dan ekonomi. kedua, area penelitian mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek yang khusus mengenai perubahan lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas

akses sumber-sumber lingkungan. Ilmuwan memperoleh pandangan bagaimana kontekstual pelaku berpengaruh atas kondisi sosio-lingkungan yang khusus, hubungan, dan menekankan perjuangan lokasi yang khusus atas lingkungan. Ketiga, penelitian area ini menjelaskan jaringan politik dari perubahan lingkungan atas hubungan sosioekonomi dan politik.

Agar pengelolaan hutan yang lestari memperoleh hasil, harus dihubungkan dengan 'politik lingkungan'. Ada dua alasan rasional. Pertama, politik lingkungan adalah suatu eksplorasi dari politik-ekonomi yang kompleks dan proses lingkungan yang menekankan pembangunan dalam sektor kehutanan. Kedua, politik lingkungan peduli dengan persepsi, kebijakan, dan praktik yang telah mengkondisikan bagaimana hutan dilihat, dipakai, dan dieksploitasi (Bryant *et al* dalam Hidayat, 11: 1993).

Ada banyak pendekatan untuk politik lingkungan (Bryant and Bailey dalam Hidayat, 1997:21-24). Pertama, untuk menjelaskan penelitian atas politik lingkungan Dunia Ketiga mengenai masalah-masalah lingkungan yang khusus atau menunjukkan masalah, misalnya kerusakan hutan tropis, banjir, erosi tanah, polusi sungai dan rusaknya mutu tanah.

Kedua, memfokuskan pada suatu konsep yang mengandung hubungan penting terhadap pertanyaan politik lingkungan. Ketiga, untuk menguji saling hubungan antara masalah-masalah politik dan lingkungan dalam hubungan kondisi geografis yang khusus. Keempat, untuk menggali

masalah politik lingkungan dalam hubungan karakteristik sosio-ekonomi seperti golongan, etnisitas atau gender.

Kelima, menekankan perlunya memfokuskan minat, karakteristik dan aksi dari tipe pelaku berbeda di dalam memahami konflik-konflik politik lingkungan. Keenam, pendekatan dan bingkai konsep politik lingkungan menyebutkan dibawah ini, ketika kita menguji dan mengidentifikasi gerakan para aktor (pelaku) dan kebijakan negara sebagai pelaku untuk pengelolaan hutan. Agar untuk menentukan sejauh mana setiap pelaku memberi kontribusi terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, ini lebih baik untuk mendefinisikan siapa aktor (pelaku) yang langsung dan tidak langsung.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dua teoritis, Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones dalam Solichin mengatakan bahwa kebijakan itu tak lain adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka mematuhi. Versi formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut: "Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi

mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”.

Menurut Thomas R. Dye (1992) dalam Sahya, “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah”. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn dalam Sahya (1995), adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertaruhkan.

2. Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk di agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau kebijakan yang ada.

3. Adopsi atau legitimasi kebijakan

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dengan demikian orang belajar mendukung pemerintah.

4. Penilaian atau evaluasi kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Budi Winarno dalam Sahya, 2008)

2.2.3 Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Wahab dalam Sahya, 2006:64), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab dalam Sahya, 2006:65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hakikat utama implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier (Widodo dalam Sahya, 2010:87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Grindle dalam Sahya (1980) dalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the Third World* mengatakan bahwa dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bergantung pada *content* (isi) dan *contextnya*, serta tingkat keberhasilannya bergantung pada kondisi tiga komponen variabel sumber daya implementasi yang diperlukan.

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran, maupun dari implementornya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak (misalnya jenis kebijakan *redistribution* menurut kategori

Ripley dan Lowie), implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit pula dilaksanakan.

d. Kedudukan pengambil keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis maupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

e. Pelaksana program

Ketika pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, tingkat keberhasilannya juga akan tinggi.

f. Sumber daya yang disediakan

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan akan mempermudah pelaksanaannya. Sumber daya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dan lain-lain.

2. *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena baik mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementatornya.

Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai.

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan sesuatu yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

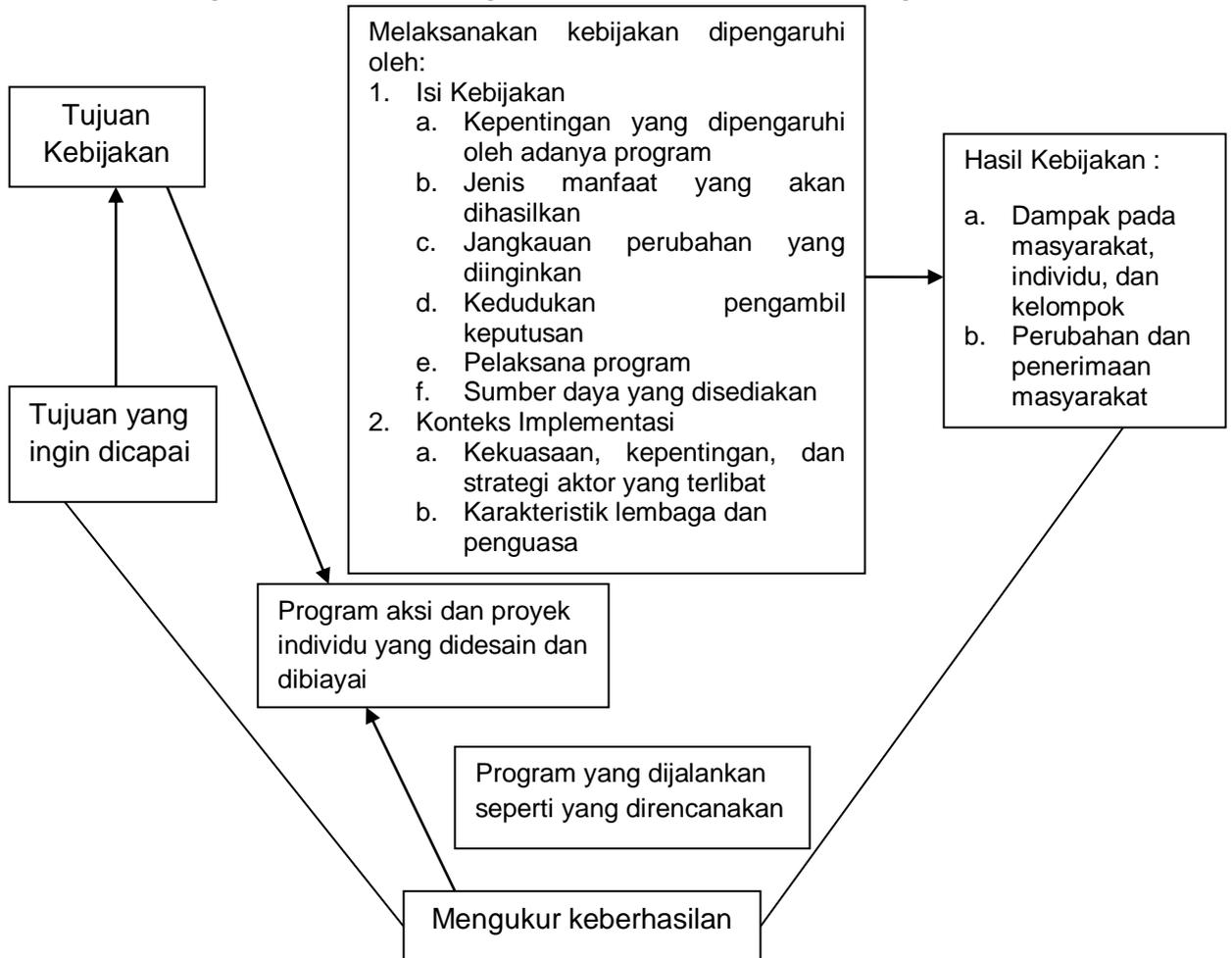
a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya.

b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingannya dipengaruhi.

Gambar 1. Implementation as a political and administrative process



Sumber: Diadaptasi dari Merilee S. Grindle dalam Sahya (1980)

2.3 Kajian Aktor

Ada dua alasan kritis untuk mengidentifikasi gerakan aktor (pelaku) pengelolaan hutan di Indonesia. Pertama adalah mengkaji aktor langsung yang dapat digolongkan misalnya negara dan pengusaha, baik lokal maupun transnasional. Kedua mengkaji pelaku tidak langsung, misalnya

lembaga keuangan Internasional (Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya), akademisi, LSM dan masyarakat lokal. Adapun dalam tulisan ini, penulis hanya fokus pada aktor langsung negara yakni departemen kehutanan dan aktor tidak langsung masyarakat lokal.

2.3.1 Aktor Langsung

Negara adalah sebagai pelaku langsung atas pembangunan kelestarian sektor kehutanan dan juga sebagai kontributor atas kerusakan lingkungan. Di Indonesia sebagai contoh, pemerintahan Soeharto memberikan konsensi HPH kepada swasta untuk menebang log (kayu bulat). Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang investasi No 1/1967 dan Undang-Undang Kehutanan No 5/1967, yang memberikan sinyal Indonesia untuk mengangkat orientasi ke luar dan pro strategi pembangunan ekonomi (Robinson dalam Hidayat, 1986).

Pada masa orde baru, aktor langsung hanyalah negara dalam hal ini departemen kehutanan dan pengusaha. Sedangkan pada era reformasi, aktor langsung selain negara, juga dilakukan oleh pemerintahan lokal baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut berubah. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam pengelolaan hutan di daerahnya masing-masing.

Hal ini pula lah yang memberikan kesempatan bagi para pemerintah lokal khususnya di tingkat kabupaten untuk mendapatkan

keuntungan pribadi dengan adanya perubahan asas pemerintahan yang dianut. Hingga akhirnya mereka dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

2.3.2 Aktor Tidak Langsung

Pelaku tidak langsung atas pengelolaan hutan dapat digolongkan misalnya, institusi keuangan internasional (Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya), akademisi (dosen dan peneliti) di berbagai institusi, LSM (lokal, nasional, dan internasional) dan masyarakat lokal. Hal ini karena berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No 5/196, mereka tidak terlibat langsung dalam praktik pengelolaan industri kehutanan seperti log dan industri kayu. Bagaimanapun, peran Bank Dunia sangat penting sebagai aktor tidak langsung, karena turut membantu sebagai penyedia keuangan dan bantuan teknik banyak proyek. Peran akademisi dan LSM yang kritis sebagai pengamat untuk mengomentari kebijakan pemerintah. Dalam masalah khusus, meskipun masyarakat lokal mempunyai hutan adat, namun mereka mempunyai sedikit akses saja untuk dapat memotong kayu di hutan produksi sehingga kontribusinya dalam sektor ekonomi sangat sedikit.

Berdasarkan hal tersebut, politik lingkungan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah peralihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan wisata di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone berdasarkan perspektif politik lingkungan menurut

Bryant and Bailey dengan kajian gerakan aktor (pelaku) baik peran pelaku langsung maupun peran pelaku tidak langsung.

2.4 Konsep Hutan

2.4.1 Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, diantaranya :

1. Hutan Konservasi, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengwetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam

antara lain: Kawasan hutan suaka alam dan Kawasan hutan pelestarian alam, Taman buru.

2. Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi(penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

2.4.2 Peralihan Fungsi Hutan

Alih fungsi lahan atau lazimnya sebagai konvensi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula. Seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi kondisi alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah pada saat ini semakin banyak dan mengkhawatirkan bagi kondisi ekologi dan ekosistem sekitarnya. Khususnya pegunungan yang lahan hutan lindungnya menjadi lahan pertanian, lahan perkebunan atau beralih fungsi menjadi perumahan warga yang dilegalkan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ataupun bentuk penyerobotan karena faktor tingkat penduduk yang semakin bertambah.

Alih fungsi kawasan hutan memang diperbolehkan Undang-Undang. Hanya ada aturannya Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:“perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu”.Namun, alih fungsi hutan tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika alih fungsi hutan ini berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, maka harus ditetapkan oleh pemerintah dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2.5 Telaah Pustaka

Penelitian ini bertumpu pada 3 literatur utama. Dimana ketiga literatur tersebut merupakan dua skripsi dan satu jurnal.

Pertama, Eko Aji Wahyudin dalam Skripsinya dengan judul “Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017). Penelitian ini membahas bagaimana kontribusi yang dilakukan oleh salah satu LSM yang bergerak pada aksi lingkungan hidup di Indonesia yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap Ruang Terbuka Hijau di Jakarta.

Persamaan dari literatur pertama ini dengan penulis yakni menggunakan perspektif dimensi Politik Lingkungan oleh Herman Hidayat serta metode yang digunakan yakni kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Perbedaan dari literatur pertama ini terletak pada objek penelitiannya dimana literatur ini membahas kontribusi WALHI sebagai salah satu aktor non formal dalam lingkup politik lingkungan. Sedangkan penulis mengambil kajian aktor langsung dan tidak langsung dalam kaitannya dengan peralihan fungsi hutan lindung menjadi kawasan wisata. Selain itu, lokasi penelitian pun berbeda dimana literatur ini dilakukan di Jakarta sedang penulis di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Kedua, Muhammad Irfan F. dalam Skripsinya dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Alih Fungsi Hutan Lindung”. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang memberikan beberapa instruksi terkait dengan perubahan fungsi kawasan hutan dalam hal ini adalah alih fungsi kawasan hutan, namun dari beberapa kewenangan tersebut dalam alih fungsi hutan tidak sesuai dengan peruntukan fungsi dan kriteria-kriteria dalam pengalihfungsian hutan sesuai dengan Peraturan Menteri kehutan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kondisi hutan di Sinjai. Selain itu, Alih fungsi kawasan hutan terjadi karena beberapa faktor diantaranya kondisi pasar, tekanan penduduk, sarana dan prasarana serta karena kebijakan pemerintah itu sendiri.

Persamaan dari literatur kedua dengan penelitian ini berdasar segi substantif ialah sama – sama membahas perubahan atau peralihan fungsi kawasan hutan lindung menjadi peruntukan yang lain. Faktor yang menyebabkannya pun sama yakni karena adanya permukiman warga.

Perbedaan literatur kedua dengan penelitian ini adalah sudut pandang dari penulisan yang digunakan dimana literatur kedua ini menggunakan tinjauan yuridis terhadap peralihan fungsi hutan lindung sedangkan penulis melihatnya melalui perspektif politik lingkungan. Lokasi penelitian pun yang berbeda dimana literatur ini bertempat di Kabupaten Sinjai, sedang penelitian ini sendiri dilaksanakan di Kelurahan Pallette, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

Ketiga, Cahyo Seftyono dalam jurnalnya dengan judul “Rawa Pening Dalam Perspektif Politik Lingkungan: Sebuah Kajian Awal”. Penelitian ini hendak membaca secara ringkas bagaimana Rawa Pening dilihat dari kaca mata politik lingkungan. Rawa Pening tidak lagi dilihat hanya sebagai sempadan air, melainkan juga ruang diskursus kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, negara dan juga tentunya ekosistem itu sendiri. Oleh karenanya, tulisan ini mendeskripsikan Rawa Pening dalam sudut pandang sains, ilmu sosial, politik ekonomi, hingga politik lingkungan itu sendiri sebagai kajian yang multidisiplin.

Persamaan dari literatur ketiga ini dengan penulis yakni sama-sama menggunakan perspektif politik lingkungan dalam melihat objek penelitian. Metode yang digunakan pun sama yakni metode kualitatif deskriptif.

Perbedaan dari literatur ketiga ini dengan penelitian penulis yakni objek kajian penelitian dimana literatur ini mengangkat rawa pening atau sempadan air sedangkan penulis mengangkat permasalahan hutan lindung menjadi kawasan wisata. Lokasi penelitian pun berbeda dimana literatur ini dilaksanakan di Jawa Tengah sedangkan penulis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

2.6 Kerangka Pemikiran

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang besar salah satunya hutan. Pengelolaan hutan menjadi sumber kedua terbesar terhadap devisa negara. Oleh sebab itu, beragam kebijakan dibuat demi memenuhi tuntutan ekonomi. Kebijakan tersebut dapat berupa peralihan fungsi kawasan hutan. Peralihan fungsi kawasan hutan sendiri sudah lama dilakukan termasuk perubahan dari hutan lindung. Hutan lindung yang awalnya berfungsi sebagai daerah penyangga ekosistem, serapan air, dan mencegah banjir kini banyak dialihkan karena beberapa faktor.

Peralihan fungsi atau perubahan tersebut didukung pula oleh stakeholder yang terkait. Peralihan fungsi kawasan hutan lindung menjadi peruntukan lain pun dilakukan di Kabupaten Bone khususnya di Kelurahan Palette sesuai SK menteri LHK No 362 tahun 2019. Oleh karena itu, aktor langsung yakni pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten memiliki peran yang sangat penting terhadap kebijakan yang diambil. Begitu pula aktor tidak langsung yang ada yakni masyarakat lokal yang juga memberikan pengaruh terhadap perubahan tersebut.

Perubahan tersebut tentu semakin mendukung pengembangan dan pembangunan objek wisata yang ada di Kelurahan Palette. Kondisi Kelurahan Palette yang strategis dan menjadi salah satu tujuan wisata unggulan, disatu sisi memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar begitu pula dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Bone.

Namun, tentu dalam perubahan kawasan yang awalnya sebagai penyangga yang berubah menjadi peruntukan lain diluar kondisinya akan memberikan implikasi terhadap lingkungan itu sendiri. Misalnya saja polusi udara dan air akibat adanya kegiatan kepariwisataan di Kelurahan Palette. Selain itu, adanya kebijakan tersebut memberikan akses yang mudah bagi para aktor yang menjadi free rider yang memiliki motif tersendiri. Pengelolaan hutan yang lestari seharusnya menjadi pedoman bagi para stakeholder (aktor langsung dan aktor tidak langsung) agar keseimbangan antara politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat terlaksana.

2.7 Skema Kerangka Pikir

